

Pengembangan Model Pelatihan Moral Politik Bagi Ormas PMKRI dengan Pendekatan Deduktif Berbasis Refleksi

Yohanes Vianey Sayangan*

Abstract: *This Research and Development study designed to develop the suitable model for moral political training for students who join the PMKRI mass organization. In addition, use the combination of MPI Model and Gibbs' Reflection Model. The development stages of this research requires steps of system approach models of educational Research and Development. The formative evaluation activities put emphasis on the reflective approach designed in the training strategy and developed in the training material. In the end, this sort of material plays as the final result of the model. Result, leads to the imperative categories for the PMKRI university students, developed a knowing, perceiving, and undertaking the essential moral political values.*

Keywords: *Moral, Moral Politics, Research and Development, Reflection, Training*

Abstrak: *Penelitian dan Pengembangan ini didesain untuk mengembangkan model yang tepat bagi kebutuhan pelatihan moral politik. Pelatihan moral politik dirancang untuk mahasiswa dalam Ormas PMKRI. Kegiatan pelatihan moral politik menggunakan model MPI yang dikombinasikan dengan model refleksi Gibbs. Ciri khas dari kombinasi kedua model tersebut terletak pada penggunaan model refleksi dalam penelitian ini. Adapun tahapan pengembangan dalam penelitian ini menggunakan steps of system approach models of educational Research and development. Kegiatan evaluasi formatif difokuskan pada pendekatan refleksi sebagaimana yang di desain dalam strategi pelatihan dan dikembangkan dalam bahan pelatihan. Bahan pelatihan merupakan produk akhir dari model ini. Hasil penelitian mengarah pada imperative kategoris bagi mahasiswa PMKRI yakni keharusan untuk mengetahui, merasakan dan menjalankan nilai-nilai moral politik.*

Kata kunci: *Model Pelatihan, Moral, Moral Politik, Research and Development, Reflection*

PENDAHULUAN

Idealnya (*das sollen*), konsep moral politik sudah merupakan bagian integral dalam program pelatihan dan pendidikan moral politik bagi mahasiswa dalam Ormas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR) sebagai kader potensial yang akan berkecimpung dalam dunia politik. Namun dalam prakteknya (*das sein*) moral politik sebagai sebuah ilmu dan pengetahuan belum menjadi bagian dari pendidikan dan pelatihan politik dalam orams PMKRI.

Ada beberapa argumentasi yang mendasari

alasan belum dijadikannya pendidikan moral politik sebagai bagian dari mata diklat bagi mahasiswa dalam ormas PMKRI. *Pertama*, pendidikan moral politik merupakan aspek baru, yang belum dijalankan dalam ormas PMKRI, sebagai upaya untuk menumbuhkan *sense of morality* dalam diri mahasiswa. *Kedu*, adanya kesenjangan antara pendidikan moral politik sebagai *imeparative kategoris* sekaligus sebagai *moral obligation* di satu pihak dengan praktek dan praksis politik di pihak lain. Akibatnya, adalah terkangkangnya nilai moral dan prinsip moralitas oleh para politisi, para birokrat pemerintah. Politik terkooptasi oleh pragmatism dan irasionalitas.

* Yohanes Vianey Sayangan, STKIP Citra Bakti Ngada, Flores - NTT. Email. Viany.sygn.wikul@gmail.com.

Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, habitus koruptif dan kolusif, praktek politik yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri dan kelompok. Dengan kata lain, politik itu identik dengan ambisius pribadi, Politik itu berkaitan erat dengan penyuaipan, Politik itu juga identik dengan Pembohongan, Politik itu juga merupakan praktek pengkianatan, dan politik itu perebutan harta illegal.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan dalam ormas PMKRI sifatnya lebih pada aspek pengetahuan umum yang berkaitan dengan sistem dan tatanan politik kenegaraan yang sudah baku dan umum (*taken for granted*).

Praktek politik awalnya diartikan sebagai estetis sekaligus etika, dalam artian politik itu seni mengelola kekuasaan dan mengarahkan kekuasaan untuk kepentingan dan kebaikan bersama (*bonum commune*). Karena itu, politik itu luhur dan mulia. Politik itu luhur dan mulia karena tujuan dari politik itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan mengantar manusia menuju keselamatan. Politik itu adalah sakramen: politik adalah tanda dan sarana keselamatan umat manusia. (Edy Kristanto, 2008: 3).

Seiring berjalannya waktu politik bergeser menjadi cara atau strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Politik menjadi alat penguasa untuk tujuan kekuasaan. Bahkan politik secara pragmatis dikreasi dan digunakan sebagai cara konkrit untuk mempertahankan kekuasaan. Karena alasan itulah politik sering dikatakan sebagai curang dan sangar tetapi politik itu sekaligus menarik untuk ditekuni eksistensi dan finalitasnya. Dalam bahasa yang lebih kontemporer, politik itu bersifat ambivalensi: dikutuk tetapi juga diharapkan. (Robert Robertus, 2010: 215). Artinya, dalam praktek perpolitikan, politik lebih dimaknai sebagai cela dan sinis. Politik itu licik, tamak, dan kotor. Namun demikian, politik itu tetap dicintai karena sisi politik yang selalu dapat dijadikan sandaran. Politik itu berdaya pikat untuk mencapai tujuan: kekuasaan. Namun demikian, kekuasaan yang tidak dilandasi oleh nalar, nurani dan moral akan berakibat pada kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Moral dan politik memiliki hubungan keterkaitan yang utuh dan tak terpisahkan. Terdapat kaitan erat antara keduanya. Hubungan antara politik dan moral dapat ditemukan dalam pernyataan Lipson (2002: 1), bahwa setiap individu bertindak sesuai

moral, dan melalui tindakannya, ia mempengaruhi orang lain, dan itu adalah politik. Politik itu milik publik. Opini kolektif publik menentukan berbagai kebijakan, dan melalui berbagai kebijakan tersebut, individu dipengaruhi. Moralitas kemudian berkaitan dengan individu yang berkaitan juga dengan politik. Moralitas mendorong individu untuk memberi kontribusi untuk opini publik, opini yang mempengaruhi kembali kepada individu melalui kebijakan. Moralitas mendominasi diskusi isu-isu politik dewasa ini. Dari pernyataan di atas, Nampak jelas, bahwa moral dan politik berkaitan erat dalam mempengaruhi tindakan manusia. Politik mengandaikan moral dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi individu manusia.

Pelanggaran moral politik dalam praktek tatanan kehidupan politik berbangsa dan bernegara, telah menggiring para penguasa, elit politik, pemangku kebijakan ke arah krisis moral dan krisis legitimasi moral sang penguasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jurgen Habermas di dalam bukunya *Legitimation Crisis*. (Habermas, 1973: 43). Krisis legitimasi (moral) menyebabkan *distrust* pihak publik (*governned*), oleh karena pihak penguasa, elit politik, pembuat kebijakan mempertontonkan tindakan-tindakan melanggar moral. Masyarakat tidak lagi mendengarkan imbauan-imbauan moral pihak berwenang (penguasa) karena penguasa justru dianggap sering mencontohkan tindakan-tindakan pelanggaran moral.

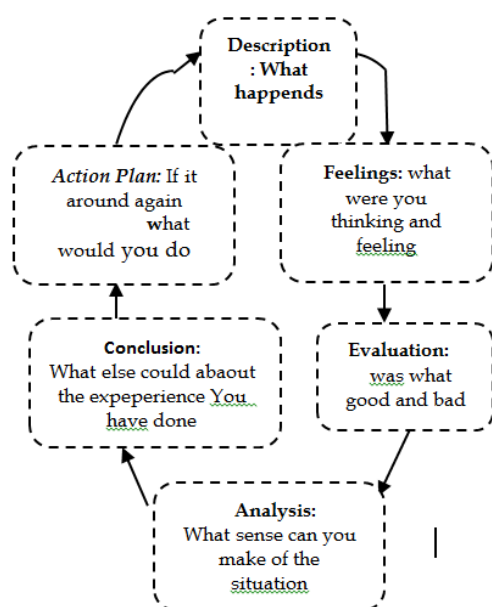
Dari semua fenomena pelanggaran moral dalam politik, yang menimbulkan perbuatan immoral para pejabat publik dan politisi, muncul pertanyaan kritis, apa yang menjadi akar yang menyebabkan para pejabat pemerintah, para politisi melakukan perbuatan *immoral*? Thompson (2000: 1) dengan gamblang berpendapat bahwa para pejabat pemerintah melakukan tindakan immoral karena alasan pemerintah ingin tampil dalam wajah yang lebih luhur. Artinya para pejabat pemerintah selain rakus, tamak, ingin berkuasa, menghamba pada yang berkuasa, tetapi terlebih melakukan immoralitas bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk melayani kepentingan publik. Jadi kepentingan publik, dijadikan alasan untuk melakukan tindakan immoral para pejabat politik dan pejabat pemerintah.

Program pelatihan dapat menjembatani persoalan kesenjangan antara pentingnya pengetahuan moral politik dengan penerapan prinsip

dan nilai moral politik bagi generasi muda dalam ormas PMKRI.

Drew O.McDaniel dan Duncan H. Brown (2001: 5-7) berpendapat bahwa pelatihan (*training*) dibedakan dari pendidikan. Tetapi, Pelatihan dapat dibandingkan dengan pendidikan. Pandangan ini didasarkan pada dua keyakinan fundamental tentang pelatihan yang telah membentuk pendekatan dan kesan kita. Dua keyakinan tersebut adalah pelatihan dibedakan dari pendidikan (*Training is different from education*) dan orang dewasa belajar berbeda dengan anak kecil (*Adults learn differently from children*)

Refleksi merupakan aspek fundamental dalam kegiatan pelatihan moral politik. Refleksi dapat ditinjau dari aspek filosofis dan dari aspek pembelajaran. John Dewey merupakan salah satu filsuf dan pedagog yang berjasa dalam meletakkan pendasaran filosofis mengenai refleksi dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. John Dewey menawarkan fundasi filosofis bagi peran refleksi dalam proses pembelajaran sebagai jembatan antara pengalaman dan teori. (Bringle, Robert, G dan Julie A. Hatcher, 1999: 114). Dijelaskan bahwa pengalaman personal, sebagaimana yang diperoleh melalui pelayanan komunitas, membiarkan atau memberikan ruang bagi teori untuk melakukan pengartian (*meaning*) jika refleksi mendukungnya dengan satu analisis dan mengkritisi latihan akan satu pengalaman. Bagi Dewey, pengalaman merupakan hal yang penting sebagai teori.



Gambar 1: Model refleksesi Gibbs

Adapun model refleksi dalam pembelajaran untuk pelatihan moral politik mengambil model refleksi Gibbs, sebagaimana yang tertera pada Gambar 1.

Peran refleksi dalam proses belajar dilihat sebagai jembatan antara pengalaman dan teori. Pengalaman personal, yang diperoleh melalui pelayanan komunitas, memungkinkan teori untuk mengambil pengertian ketika refleksi mendukung suatu analisis dan uji kritis atas pengalaman. Dewey berpendapat bahwa pengalaman itu penting seagai teori.

Keseluruhan uraian konsep, data, informasi dan permasalahan pada latar belakang tersebut itulah yang menjadi dasar pemikiran penulis, untuk melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan model program pendidikan dan pelatihan moral politik bagi Generasi Muda Ormas PMKRI.

Fokus penelitian ini adalah masalah moral politik bagi generasi muda sebagai upaya pembangunan karakter khususnya bagi generasi muda dalam Ormas PMKRI.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana fenomena moral politik yang sedang berlangsung dalam kalangan generasi muda Ormas PMKRI pada 5 tahun terakhir?; (2) Bagaimana model pelatihan moral politik yang dapat digunakan bagi generasi muda Ormas PMKRI?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai model yang dihasilkan untuk pendidikan dan pelatihan moral politik yang berbasiskan refleksi. dalam rangka membangun karakter generasi muda pada Ormas PMKRI.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan fenomena moral politik yang sedang berlangsung dalam kalangan generasi muda Ormas PMKRI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; (2) Menemukan model pengembangan pelatihan moral politik yang tepat dan relevan dengan konsep moral politik yang dapat diterapkan bagi generasi muda Ormas PMKRI.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Dalam upaya menjawab masalah penelitian, peneliti perlu menentukan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai kerangka acuan untuk peneliti lakukan dalam kegiatan penelitian. Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan fenomena moral politik yang sedang berlangsung dalam kalangan generasi muda Ormas PMKRI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. (2) Menemukan model pengembangan pelatihan moral politik yang tepat dan relevan dengan konsep moral politik yang dapat diterapkan bagi generasi muda Ormas PMKRI.

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan (*Educational Research and Development (R&D) or Research-Based Development*) khususnya untuk kegiatan pelatihan.

Ada tiga tahapan dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk program pelatihan moral politik. Ketiga tahapan tersebut adalah *pertama*, tahapan identifikasi, yang meliputi analisis kebutuhan (*need assessment*) dan merumuskan tujuan pelatihan, melakukan analisis kegiatan pelatihan, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta pelatihan serta merumuskan tujuan pelatihan khusus. *Kedua*, tahapan pengembangan, yang dimulai dengan membuat alat penilaian, merancang strategi pelatihan. Kekhususan penelitian ini adalah menempatkan model refleksi Gibbs pada strategi pelatihan, di dalam kegiatan latihan, berupa diskusi kelompok dan refleksi individu. Tahapan ini dilanjutkan dengan merancang bahan pelatihan (*training materials*) berdasarkan urutan dalam strategi pelatihan. *ketiga*, tahapan evaluasi formatif. Dalam tahapan ini, bahan pelatihan akan direviu oleh *one-to-one experts, one-to-one learners; small group dan field test*.

Penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini di adaptasi dari Borg dan Gall. (1983: 772), mereka mendefinisikan *Research and development is the process of researching consumer needs and then developing products to fulfill those needs. The products : Training materials, learning materials, media materials, management systems.*

Penelitian dan pengembangan merupakan proses meneliti kebutuhan consumer dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan consumer. Produknya adalah: materi pelatihan, materi belajar, media dan system manajemen. Yang dimaksudkan adalah menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pembelajar, peserta pelatihan berupa materi pelatihan, materi belajar, media dan

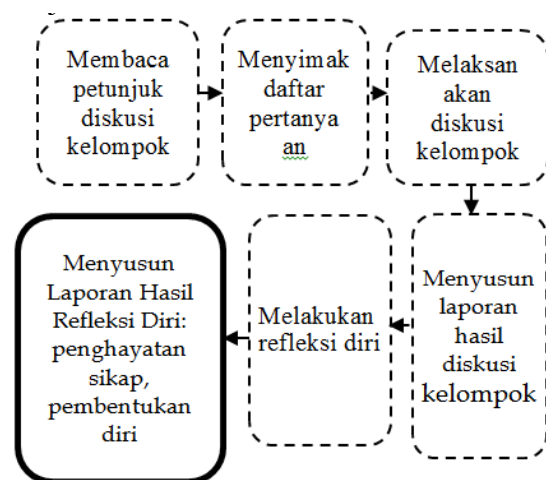
system manajemen.

Tahap Pengembangan

Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus, yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan produk tertentu. Dalam pengembangan model, terdapat 10 langkah, berdasarkan *The Systematic Design of Instruction* dari Dick, Carey dan (2009). Langkah-langkah pengembangan model tersebut adalah: (1) mengidentifikasi tujuan pembelajaran; (2) melaksanakan analisis pembelajaran; (3) mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa; (4) merumuskan tujuan performansi; (5) mengem-bangkan butir tes acuan patokan; (6) mengembangkan strategi pembelajaran; (7) mengembangkan materi pembelajaran; (8) mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; (9) merevisi bahan pembelajaran; (10) mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.

Tahapan Refleksi Pelatihan Moral Politik

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan langkah-langkah refleksi dalam program pelatihan moral politik. Refleksi menjadi kunci dalam menjalankan program pelatihan moral politik. Karena refleksi mendalami persoalan secara kedirian yang melibatkan pikiran dan perasaan. Adapun tahapan refleksi dalam kegiatan pelatihan moral politik dapat dikonstruksi disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan refleksi

Tahap I: Diskusi Kelompok

Pertama, peserta pelatihan akan dibagi kedalam

beberapa kelompok kecil. 1 kelompok, terdiri dari 5 orang. Alasan ditetapkan kelompok kecil dimaksud agar proses pelatihan dan tujuan dari pelatihan mencapai hasil yang efektif dan tepat guna. Setiap kelompok dipandu oleh seorang fasilitator. Antara fasilitator dan anggota kelompok berkedudukan sama.

Kedua, tempat, bebas dipilih sesuai dengan suasana hati dan permintaan peserata. Bisa dalam ruangan, bisa di tempat terbuka atau alam bebas. Pemilihan tempat sangat penting, untuk berlangsung pelatihan. Tempat harus senyaman mungkin. Suasana tempat pelatihan hendaknya ditata berbentuk lingkaran, menunjukkan kesetaraan dan kesatuan.

Ketiga, suasana harus diciptakan serileks mungkin, karena yang dibutuhkan adalah peran serta aktif semua anggota untuk memberi informasi, masukan dan pandangan kritis.

Keempat, adapun metode yang digunakan dalam proses pelatihan adalah sharing, dialog, diskusi serta ceramah dan reflektif. Karena yang diutamakan dalam proses pelatihan ini adalah paartisipasi aktif semua peserta.

Kelima, media. Media yang digunakan dalam pelatihan moral politik menggunakan media elektronik, buku panduan, alat tulis menulis.

Tahap II: Refleksi Individu.

Melakukan refleksi pribadi dalam keheningan untuk memperoleh jawaban dari kedalaman diri mengenai persoalan moral politik. Hasil jawaban dituangkan dalam tulisan berupa porto folio.

Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model

Pada saat melakukan penelitian idealnya pengembang model pembelajaran melalui empat tahap yaitu: review oleh ahli, (*One-to-One evaluation by content expert* (s)); evaluasi satu-satu, (*One-to-One evaluation by learners*); evaluasi kelompok kecil (*Small Group evaluation*) dan uji coba lapangan (*Field Trial*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian Pendahuluan

Dari hasil penelitian pendahuluan sebagai kegiatan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan moral politik bagi mahasiswa dalam Ormas PMKRI, ditemukan beberapa poin penting, sebagai berikut:

Pertama, adanya sesuatu yang hilang dalam diri generasi muda yang tergabung dalam Ormas PMKRI, yaitu jiwa dan idealisme akan pentingnya nilai, moral, dan moralitas dalam memandang dan menyikapi praktek politik dewasa ini. Mahasiswa sebagai generasi muda yang berkecimpung dalam ormas PMKRI cenderung pragmatis terhadap masalah moral. Ada juga yang bergaya hidup santai dan individualis.

Kedua, sejauh ini, mahasiswa sebagai generasi muda dalam oramas PMKRI juga belum mendapatkan program pendidikan politik tentang moral politik secara sistematis dan struktural. Hal ini disebabkan oleh terpakunya pendidikan dan pelatihan politik dalam ormas PMKRI pada aspek-aspek yang sudah baku dan umum, seperti sistem ketetaneagaan, ideologi Negara, perkembangan politik dewasa ini, struktur kepartaian, sistem pemilu.

Ketiga, faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan yang begitu besar antara apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan dan apa yang dipelajari oleh generasi muda dari Ormas PMKRI mengenai pentingnya pendidikan moral politik sebagai *imeparative kategoris* sekaligus sebagai *moral obligation* di satu pihak dengan praktik dan praksis politik di pihak lain adalah terkangkangnya nilai moral dan prinsip moralitas oleh para politisi, para birokrat pemerintah. Politik terkooptasi oleh pragmatism dan irasionalitas. Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, habitus koruptif dan kolusif, praktek politik yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri dan kelompok.

Keempat, krisis moral politik yang disebabkan perilaku dan habitus praktek kejahatan politik oleh politis dan birokrat sangat kronis. Butuh penyelamatan yang memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Tak terkecuali keterlibatan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk memberikan penyadaran akan pentingnya memahami nilai, moral dalam kehidupan sosial dan politik melalui program pembelajaran, pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal.

Kelima, pendidikan moral politik dalam ormas PMKRI sendiri belum merupakan satu program pelatihan dan pendidikan untuk dipelajari dan untuk dijadikan sebagai sebuah pengetahuan (*moral knowing*). Fakta seperti ini, tentu menunjukkan bahwa moral politik masih jauh harapannya untuk

dapat dijadikan panduan dan kewajiban moral yang sifatnya otonom. Dalam arti moral politik belum dilihat sebagai bagian dari kedirian seseorang, khususnya bagi generasi muda dari ormas PMKRI, sehingga moral politik belum bisa menjadi bagian dari aspek *moral feeling* generasi muda ormas PMKRI.

Jadi, aspek pendidikan moral politik sebagai upaya untuk pembangunan karakter generasi muda untuk Ormas PMKRI belum dijalankan secara spesifik, terencana, sistematis dan terstruktur.

Tahap Mengembangkan

Hasil penelitian pengembangan model pelatihan moral politik fokusnya adalah pada rancangan strategi pelatihan yang berbasiskan refleksi. Itu berarti, hasil pelatihan telah melewati (1) tahapan identifikasi yang meliputi identifikasi kebutuhan dan tujuan pelatihan, analisis pelatihan, identifikasi perilaku dan karakteristik awal dan (2) tahapan mengembangkan yang mencakup perumusan tujuan khusus; menulis tes; serta merancang strategi pelatihan: merancang pelatihan dengan refksi sebagai basis dalam membuat bahan pelatihan.

Pendekatan yang digunakan dalam program pelatihan moral politik adalah pendekatan *deduktif* yang menjadi titik Bergeraknya. Dalam tahap penyajian di dalam strategi pelatihan moral politik, hal yang dikemukakan selalu dimulai dengan menyajikan konsep, teori, pendapat tentang moal politik serta relevansinya penyimpangan perilaku politik oleh elit politik dan penguasa.

Setelah menyajikan konsep, teori atau pandangan mengenai moral politik dan persoalannya, langkah berikut adalah memaparkan contoh dan non contoh disertai gambar, foto atau karikatur politik yang nyata untuk memberi gambaran yang lebih nyata dan konkret mengenai penjelasan atas konsep, teori atau pendapat pakar moral politik yang sifatnya abstrak.

Latihan untuk kegiatan pelatihan moral politik berkonsentrasi pada kegiatan refleksi. Refleksi menjadi kunci kegiatan refleksi. Refleksi dijalankan dalam bentuk diskusi kelompok dan dalam bentuk individu.

Dalam strategi pelatihan, letak kekhususan dari refleksi ada pada tahapan latihan. Sehingga latihan mendapat porsi terbanyak baik dari aspek waktu, metode dan medianya.

Tabel 1. Pendekatan deduktif: program pelatihan moral politik

Garis Besar Isi		Metode	M e d i a	W a k t u
TAHAP PENYAJIAN				
Uraian	Berupa konsep, teori, pandangan atau pendapat mengenai moral politik.			
Contoh dan non contoh	Contoh konkret berupa data, fakta, ketokohan, figur, disertai gambar, karikatur politik			
Latihan: Kegiatan Refleksi	Latihan lebih memfokus pada kegiatan refleksi berupa (1) diskusi kelompok, dan (2) refleksi pribadi.	Sharing, narrative experiential, diskusi, permenungan		
Rangk.				
Glosarium				

Dalam hal pemilihan metode, program pelatihan moral politik menggunakan variasi berbagai metode dalam pelatihan moral politik. Ada metode ceramah untuk menjelaskan materi atau bahan moral politik, metode naratif eksperiensial untuk sharing diskusi dalam kelompok, ada metode tanya jawab atau diskusi interaktif.

Faktor media juga memegang peran penting dalam upaya mempermudah pelaksanaan program pelatihan moral politik. Media dan alat digunakan untuk meluncurkan pesan atau informasi berupa pengetahuan, penalaman dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan itu bisa berupa manusia yaitu fasilitator dan peserta pelatihan moral politik. Sedangkan media yang digunakan dapat berupa alat elektronik, gambar, buku, dan lainnya.

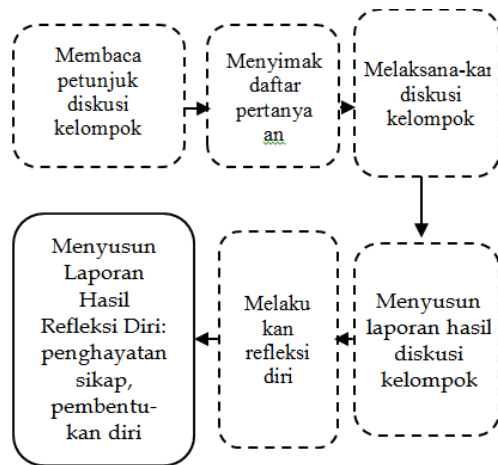
Selain itu, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa program pelatihan moral politik tidak menggunakan pendekatan sentralistik, dalam arti

pelatihan tidak harus dilakukan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama. Pelatihan ini dapat berjalan secara informal sesuai dengan situasi dan konteks lingkungan dan ruang lingkup saat dilakukan pelatihan.

Tahap Evaluasi: Berbasis Refleksi

Kegiatan refleksi dalam evaluasi formatif terdapat dalam tahapan evaluasi small group dan tahapan uji lapangan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan diskusi kelompok dengan mekanisme diskusi kelompok dan pembahasan. Sedangkan kegiatan refleksi dilakukan secara pribadi.

Tahapan refleksi yang pertama adalah melakukan diskusi kelompok, sebagaimana terdapat dalam kolom pada Gambar 3.



Gambar 3: melaksanakan diskusi kelompok

Diskusi kelompok menunjukkan dinamika dan proses dialektika yang mengemukakan adanya argumentasi solutif. Dalam artian, setiap anggota kelompok begitu aktif menanggapi pertanyaan pendalaman akan masalah yang disodorkan.

Diskusi dan pembahasan kelompok mengenai pertanyaan yang diajukan oleh instruktur menimbulkan keragaman jawaban dari setiap kelompok. Dalam diskusi kelompok, muncul dinamika dialektika yang sifatnya argumentif - solutif. Jawaban anggota kelompok dapat ditanggapi berbeda, ada yang mendukung, tetapi kebanyakan disanggah dan ada yang mampu menyimpulkan (terjadi proses tesis, antithesis, dan sintesis). Itulah proses diskuis yang diidentikan sebagai dialektika yang sifatnya argumentif - solutif. Adapun aspek-aspek penilaian, ada pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek yang diamati dalam diskusi

Aspek Penilaian	Skor	Rata-rata kelompok				
		I	II	III	IV	V
Keaktifan	15	15	15	15	15	15
Kerja Sama	20	17	17	18	17	17
Kontribusi pendapat	15	13	13	15	15	15
Kedalaman pembahasan	25	23	22	23	23	
Kemampuan menjelaskan konsep, ide, argumtasi	25	23	22	23	22	
Total	100	91	89	94	92	

Dari hasil pengamatan terhadap proses diskusi kelompok, hampir nampak kemiripan dinamika diskusi untuk setiap kelompok. Jawaban atas pertanyaan ditanggapi beragam dan berbeda bahkan ada yang saling menyanggah dengan dasar argumentasi yang logis dan rasional, sehingga jawaban anggota kelompok saling memperkaya melalui koreksi oleh teman diskusi dalam kelompok. Bahkan yang terjadi adalah apa yang disebut dengan *corectio fraternal*.

Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mengenai pertanyaan yang sama dan mengenai persoalan yang sama, diperoleh jawaban yang berbeda, jawaban yang mewakili kelompok masing-masing.

Karena, pernyataan yang keluar dari setiap peserta dihasilkan dari permenungan pribadi selama awal-awal diskusi. Setiap peserta mengambil waktu hening untuk menggali persoalan yang diperoleh melalui pertanyaan diskusi.

Dari hasil pengamatan terhadap diskusi kelompok, diperoleh hal-hal baru yang digali dari refleksi diri, berdasarkan aspek keaktifan, kerja sama, kontribusi pendapat dan kedalaman pembahasan.

Dari segi keaktifan, sejauh pengamatan pendesain materi moral politik, dan juga dari keterangan yang diperoleh dari instruktur, menunjukkan bahwa semua anggota kelompok dari 5 kelompok diskusi masuk kategori aktif. Walaupun muncul individu tertentu yang mendominasi diskusi. Keaktifan setiap peserta dapata dilihat partisipasi dalam diskusi. Semua peserta antusias dalam berdiskusi, tanpa ada paksaan.

Dari segi kontribusi pendapat, semua peserta juga mengajukan pendapat atau argumentasi.

Peserta diberi kebebasan untuk mengungkapkan pandangan, pendapat dan pengalaman masing-masing. Umumnya, dalam kelompok semua orang menyampaikan pandangan dan sikapnya. Hal ini efektif, karena kelompok itu kecil.

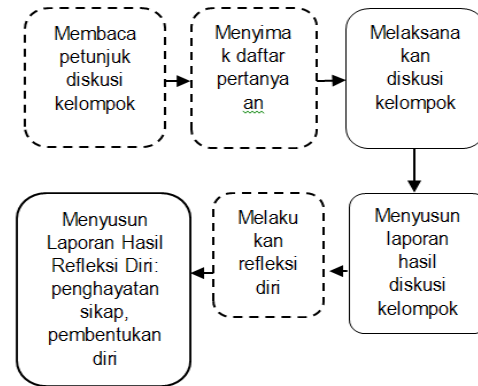
Soal kedalaman pembahasan, menjadi hal khusus. Pertanyaan yang diajukan sifatnya beraliran filsafat dan moral. Para peserta tidak semua memahami filsafat politik dan filsafat moral atau berlatarbelakngan ilmu politik. Namun demikian, persoalan politik dan persoalan moral dapat dipahami oleh semua peserta. Semua kelompok dapat menjawab pertanyaan. Tidak semua kelompok mampu menganalisis secara mendalam inti persoalan yang ditanya. Jawaban, sebagai rangkuman pendapat kelompok, tidak terutama melihata kedalaman analisisnya, tetapi pengungkapan pengalaman bersama, sharing kelompok mengenai masalah moral politik. Dan hal inilah yang terjadi dalam diskusi kelompok, sharing pengalaman bersama sebagai hasil refleksi pribadi dan refleksi bersama.

Hasil diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dalam forum. Dalam presentasi kelompok, hasil diskusi yang telah dirumuskan sebagai sebuah sintesa dipresentasikan oleh setiap kelompok kepada peserta pelatihan moral politik. Dalam diskusi interaktif, antara kelompok dan para peserta pelatihan, terjadi dialog interaktif. Diskusi begitu hidup dan dinamis. Diskusi interaktif diarahkan pada upaya menemukan jawaban secara bersama untuk pemecahan persoalan moral politik yang sudah terjadi serta mencari kiat dan upaya penyelamatan manusia politik dari bahaya erosi dekadensi moral di bidang politik melalui proses penyadaran (konsientisasi).

Proses diskusi interaktif ini juga berlaku juga untuk kelompok yang lain, dengan mempresentasikan persoalan yang sama. Pada titik inilah, bisa dilihat, bahwa laporan berupa sistesis dari setiap kelompok, menunjukkan adanya pengayaan konsep dan solusi sebagai jawaban atas permasalahan moral politik.

Dari segi waktu, perkiraan alokasi waktu yang dirancang dalam strategi pelatihan mengalami perubahan. Diskusi yang semualnya dialokasikan 90 menit untuk kegiatan diskusi kelompok, mengalami perubahan menjadi 180 menit. Itu berarti, waktu untuk diskusi dan pendalaman persoalan moral politik dalam upaya pembangunan karakter politik untuk generasi muda bagi mahasiswa/mahasiswi PMKRI

membutuhkan alokasi waktu yang banyak. Tahapan menyusun laporan diskusi kelompok disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan menyusun laporan diskusi kelompok

Setelah melakukan diskusi kelompok, pimpinan kelompok secara bersama melakukan perumusan jawaban sebagai jawaban kelompok.

Jawaban kelompok sangat bervariasi. Sebagai contoh jawaban atas pertanyaan “Mengapa persoalan moral politik di Indonesia bersifat ambivalen, dalam arti, di satu pihak moral dinilai penting dalam perpolitikan, tapi di lain pihak moral dikangkangi dalam praktek politik?”

Hasil jawabannya menarik dan bervariasi. Jawaban diskusi yang menunjukkan kekayaan makna sebagai ungkapan refleksi kelompok.

Kelompok 1: intinya menjawab bahwa persoalan moral bersifat dualism karena para politisi merupakan manusia munafik. Berwajah ganda: dihadapan publik mengatakan moral bangsa harus menjadi pedoman perilaku berpolitik. Tetapi secara individu, persoalan moral dinaifkan demi keuntungan sesaat.

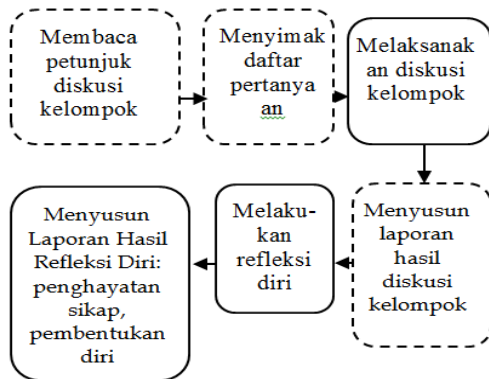
Kelompok 3: pecahnya integritas diri dan hilangnya kontrol publik menjadi penyebab kemerosotan moral yang berimbas pada ambivalensi moral dalam perpolitikan.

Kelompok 5: prinsip hidup hedonism dan keserakahan menjadi sumber ambivalensi moral dalam politik. Para politisi di mana saja terutama dalam lembaga legislatif, sudah dirasuki gaya hidup hedonism yang buruk. Para politisi, para pejabat seang menumpuk harta, bergaya hidup parlente, menimbun barang mewah, memamerkan kekayaan seperti mobil mewah, rumah mewah.

Ini merupakan contoh, hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan setiap kelompok setelah

perumusan jawaban bersama dalam kelompok.

Setelah peserta pelatihan moral politik melakukan diskusi kelompok, tahapan berikutnya adalah melakukan refleksi pribadi sebagai tahap berikut seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan refleksi pribadi

Refleksi pribadi merupakan langkah lanjut dari diskusi kelompok. Setiap peserta melakukan permenungan pribadi mengenai permasalahan, pengalaman dan kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dan pelanggaran moral politik oleh para politisi berdasarkan panduan pertanyaan reflektif yang telah disiapkan, kemudian menjawab pertanyaan secara tertulis.

Refleksi pribadi dilakukan di luar dari kegiatan diklat moral politik. Pada tahap ini peserta tetap di bawa ke dalam proses kegiatan diklat moral politik, dengan konteks dan situasi yang berbeda. Hal yang penting dari kegiatan diklat moral politik adalah menciptakan ruang dan kesempatan bagi para peserta untuk membawa pulang persoalan moral politik ke tempat yang lain dalam situasi berbeda, peserta tidak membatasi diri pada penerimaan materi saat dalam ruangan atau forum. Hal yang lain yang dapat mengahntar peserta melanjutkan membahas persoalan dan mendalaminya serta berupaya memikirkan dan menindaklanjuti permenungan melalui niat atau tindakan nyata adalah melalui refleksi pribadi.

Refleksi pribadi berupaya untuk menjawab persoalan secara akal, tetapi jawaban itu diperoleh berdasarkan hasil olah cipta, karsa dan rasa yang mendalam. Sehingga jawaban atas persoalan moral politik dilakukan dengan segenap hati, segenap pikiran dan segenap perasaan. Persoalan moral politik dijawab atas dasar pertimbangan rasio dan

pengalaman nyata, yang diolah atas dasar pengalaman dan pengetahuan diri setiap peserta pendidikan dan pelataihan moral politik. Oleh karena itu, hasil permenungan itu dituangkan dalam bentuk tulisan.

Jawaban hasil permenungan mendalam dituangkan dalam bentuk tulisan yang akan menjadi porto folio, sebagai bentuk tanggapan dan buah pemikiran yang memuat makna pengungkapan sikap serta niat untuk perubahan sikap bagi setiap peserta diklat.

Dari hasil refleksi berupa porto folio, dapat dijumpai sikap dan penilai setiap orang mengenai masalah atau persoalan dan pandangan mengenai pelanggaran moral politik oleh para politisi.

Tabel 3. Refleksi pribadi

No	MATERI	Ket.
1	Deskripsi: Apakah refleksi yang dilakukan menggambarkan fakta pelanggaran moral politik?	20 sangat setuju, 5 setuju
2	Feelings: Apakah refleksi yang dijalankan sudah mengungkapkan perasaan dan piikiran anda ?	19 sangat setuju, 6 setuju
3	Evaluation: Apakah kejahatan politik menggambarkan buruknya perilaku moral para politisi?	23 sangat setuju, 2 setuju
4	Analysis: Apakah refeeaksi yang dilakukan sungguh mendalami situasi atau fakta praktek pelanggaran moral politik dewasa ini?	23 sangat setuju, 2 setuju
5	Conclucion: Sebagai calon politisi, Apakah anda harus bersikap jujur, adil, rela berkorban, dan bertanggung jawab?	25 sangat setuju
6	Action Plan: Apakah anda setuju perubahan sikap berpolitik (jujur, adil, membela kebenaran, serta bertanggung jawab) mulai dari diri anda?	20 sangat setuju, 5 setuju

Jawaban hasil refleksi pribadi jelas menggambarkan peristiwa atau keajdian pelanggaran moral politik seperti: masalah korupsi, suap dan lain-lain. Selain pengalaman, refleksi juga melibatkan perasaan (*feelling*) apa yang dipikirkan dan dirasakan berkaitan dengan kasu-kasu pelanggaran moral oleh pejabat publik dan politisi. Peristiwa atau kejadian yang ada di evaluasi (*evaluation*) hal apa saja yang masih dinilai baik dari perilaku atau hal buruk apa

saja yang dilakukan. Peristiwa yang sudah dinilai lalu dianalisis (analysis) mengapa hal itu bisa terjadi dan dilakukan terus menerus oleh para politisi. Langkah berikut adalah, membuat kesimpulan, terhadap berbagai persoalan yang ada. Atas dasar itu, dilakukan tindak lanjut, apa yang akan dilakukan (*action Plan*)

Penilaian hasil refleksi pribadi dilakukan dengan menjawab lima (5) pilihan: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. disajikan pada Tabel 3.

Dari 25 peserta pelatihan diperoleh penilaian sebagai berikut: dari 25 peserta yang memberi jawaban sangat setuju mengenai pertanyaan apakah refleksi yang dilakukan menggambarkan fakta pelanggaran moral politik? (*What happens*), sebanyak 20 menjawab sangat setuju. Sedangkan 5 memberikan jawaban setuju. Apakah anda setuju, refleksi yang dijalankan sudah mengungkapkan perasaan dan pikiran anda? (*What where you thinking and feeling*)? dari 25 peserta yang jawab sangat setuju sebanyak 19 peserta, sedangkan 6 peserta menjawab setuju. Apakah kejahatan politik menggambarkan buruknya perilaku moral para politisi? (*Was what good and bad about the experience*). Dari 25 peserta, sebanyak 23 peserta menjawab sangat setuju, sedangkan 2 peserta menjawab setuju. Apakah refleksi yang dilakukan sungguh mendalami situasi atau fakta praktek pelanggaran moral politik dewasa ini? Dari 25 peserta menyatakan sangat setuju. Apakah anda harus lakukan sikap jujur, adil, rela berkorban, bertanggung jawab sebagai calon politisi? (*What else could you have done*). Dari 25 peserta, yang memberi jawaban sangat setuju sebanyak 20 peserta, sedangkan 5 peserta menjawab setuju. Apakah anda setuju perlu perubahan sikap berpolitik mulai dengan dan dari diri anda seperti bersikap jujur, adil, membela kebenaran, serta bertanggung jawab? Dari 25 peserta semua menjawab sangat setuju.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengembangan model pelatihan moral politik bagi generasi muda Ormas PMKRI.

Pertama, pendidikan nilai dan moral belum tertanam kuat dalam diri setiap orang yang bergelut di dunia politik, pemerintah. Para politisi lebih pragmatis dalam menjalankan praktek politik dan pemerintahan, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan

kesenangan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, solider, pengobanan untuk kepentingan rakyat diabaikan begitu saja. Hal, ini berlaku baik bagi politisi senior hingga politisi mudah. Hilangnya idealism, nilai juang, dan nilai pengorbanan.

Faktor lainnya, terjadi karena moral secara menyeluruh dipinggirkan dari semua proses hidup normal masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat moral itu ditanamkan sudah tidak lagi konsisten melaksanakan tugasnya. Dalam konteks politik praktis, sistem hukum juga didesign sedemikian rupa sehingga perilaku amoral pun terlindungi melalui sistem yang terlembaga. Kelemahan pendidikan dalam berbagai lingkup merupakan hal pertama yang membuat generasi muda juga terkena getah dekadensi moral. Kedua, kelemahan pendidikan moral itu menjadi begitu mudah membentuk kader muda untuk tunduk pada praktek yang diwarisi oleh generasi terdahulu. Tidak ada filter nurani pada politisi muda yang menjadi roh pendobrak melawan kebiasaan dunia politik yang dimasukinya.

Salah satu langkah strategis untuk menyiapkan kader muda awam Katolik dalam hal ini mahasiswa yang tergabung dalam Ormas PMKRI adalah melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana dan sistematis serta terstruktur. Terencana dalam pengertian, program pelatihan dalam bidang politik betul-betul program tersebut sudah dipersiapkan secara utuh baik dari segi kesesuaian antara kebutuhan pelatihan bagi peserta pelatihan, merancang tujuan dan strategi pelatihan, menyiapkan materi pelatihan, hingga tenaganya. Dengan kata lain, program pelatihan moral politik bagi mahasiswa dalam Ormas PMKRI harus sudah didesain dan dikembangkan berdasarkan proses dan tahapan desain instruksional.

Kedua, konsep moral politik yang ideal bagi Ormas PMKRI dirancang dan didesain sesuai dengan fundasi teori, pendapat dan pandangan aktual yang relevan dengan persoalan dekadensi moral politik saat ini, yang sedang dialami bangsa ini. Teori, pendapat dan pandangan tentang moral politik yang dibangun untuk digunakan bagi generasi muda dalam Ormas PMKRI juga telah dilalui dalam tahapan evaluasi, baik yang dilakukan oleh kelompok ahli materi (*one – to – one expert*), evaluasi 3 mahasiswa PMKRI (*one – to – one leaners*), evaluasi *small group*, dan evaluasi *field trial* atau kelompok uji lapangan.

Konsep moral politik dikembangkan dengan

menggunakan pendekatan deduktif dan berbasis refleksi. Pendekatan deduktif dalam konteks pelatihan moral politik, dimaksudkan dengan menempatkan teori, konsep, pandangan mengenai moral politik sebagai titik tolak dalam penyajian bahan pelatihan (*training materials*). Pendekatan ini, menghantar para peserta untuk mendalami masalah moral politik, melalui konsep, teori, pandangan-pandangan, prinsip moral politik terlebih dahulu. Setelah itu, peserta diperjelas, dibuka wawasan, diperkuat dan diperkaya pemahaman akan konsep, teori, pandangan-pandangan, prinsip moral politik dengan dan melalui contoh, non contoh, fakta, ilustrasi melalui *naratif experiential*. Berbagai konsep, teori, pandangan-pandangan, prinsip moral politik yang telah diperkaya melalui contoh, non contoh, fakta, ilustrasi kemudian digali secara mendalam melalui cara refleksi. Refleksi menjadi penghubung antara pengalaman dan tindakan mahasiswa. Refleksi juga merupakan proses perubahan pribadi yang mampu mempengaruhi perubahan lingkungan. Refleksi berarti mengadakan pertimbangan seksama dengan menggunakan daya ingat, pemahaman, imajinasi, dan perasaan menyangkut bidang ilmu, pengalaman, ide, tujuan yang diinginkan para peserta pelatihan moral politik. Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program pelatihan moral politik belum pernah dijalankan dalam oramas PMKRI. Pendidikan politik yang dijalankan dalam organisasi Ormas PMKRI selama ini belum pernah menyentuh aspek moral politik. Jadi program pelatihan moral politik yang didesain peneliti untuk mahasiswa dalam oramas PMKRI merupakan bahan yang baru untuk sebuah kegiatan program pelatihan pendidikan politik dalam ormas PMKRI.

Pelanggaran moral di bidang politik yang melanda bangsa ini oleh para elit politik, oleh para politisi belum mendapatkan perhatian dalam bentuk pendidikan atau pembinaan bagi mahasiswa PMKRI sebagai satu bentuk konsientisasi melalui bentuk pendidikan yang didesain secara tepat dari perpektif desain instruksional.

Dari hasil penelitian awal juga ditemukan fakta bahwa selama ini pelatihan atau pendidikan dan pembekalan di bidang politik yang dijalankan di dalam ormas PMKRI belum dirancang sesuai prinsip-prinsip desain pembelajaran (*design instructional*) sesuai langkah-langkah dan tahapan-tahapannya secara utuh. Jadi, pelatihan atau pendidikan politik

dalam ormas PMKRI selama ini dijalankan secara formal tapi belum dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan prinsip desain instruksional.

Dari temuan di atas, disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan pelatihan selama ini, mengikuti proses pembelajaran seperti dalam perkuliahan. Materi yang ada diajarkan kepada peserta dengan sistem mimbar. Peserta hanya sebagai pendengar pasif. Jadi, program pelatihan lebih berorientasi pada transfer knowledge dari instruktur kepada para peserta; (2) program pelatihan sifatnya sporadis dan fragementatif. Program pelatihan tidak berorientasi pada bagaimana untuk mengubah *performance (how to improve performance)*. Selama ini program pelatihan dijalankan hanya sebatas pemberian materi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Program diklat sangat minim untuk mengarah pada upaya pembentukan dan perubahan sikap; (3) program diklat sangat terbatas waktunya pada jam mata diklat. Diklat seharusnya berkesinambungan baik dalam kelas dan dilanjutkan terutama di luar kelas, dengan cara mendalami materi berdasarkan diskusi dan pendalaman oleh kelompok hingga pendalaman secara pribadi melalui refleksi.

Oleh karena itu, dalam konteks program pelatihan moral politik, peneliti merancang atau mendesain sebuah program pelatihan untuk pendidikan politik di bidang pelatihan moral politik sesuai tahapan-tahapan *Research and Development*, yakni tahapan atau proses penelitian berdasarkan *The Step of System Approach Model of Educational Research and Development*, yang telah melakukan adaptasi model *The Systematic Design of Instruction* karangan Dick, Carey and Carey, yaitu dari tahap mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan umum dan karakter siswa, menganalisis instruksional, merancang strategi pelatihan, menyusun materi pelatihan, serta melakukan tahapan evaluasi formatif yang dipadukan dengan model refleksi Gibbs. Pokok yang menjadi ciri khas dalam penelitian ini adalah menerapkan refleksi sebagai basis dari program pelatihan moral politik.

Dari hasil temuan dan kajian sebelumnya mengenai moral politik dan hasil temuan peneliti sendiri mengenai moral politik sebagai upaya pembangunan karakter generasi muda ormas PMKRI, ditemukan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan masalah moral politik yang sedang terjadi dalam praktek dan praksis politik oleh para politisi dan

birokrat pemerintahan di Indonesia. Secara lebih rinci hasil pembahasan ini dapat dikembangkan sebagai berikut: (1) Ada masalah serius yang berkaitan dengan kemerosotan dan hancurnya praktek politik di negeri ini yang dilakoni oleh para politisi, birokrat pemerintah. Praktek politik akhir-akhir ini telah terjerumus jauh dalam dalam pemerosotan moralitas politik yang sangat serius. Pemerosotan moralitas di bidang politik itu menyata dalam tindakan pencucian dan pencurian uang atau habitus korupsi, suap, pengabaian akan kaidah dan nilai keadilan dan kebenaran, pola hidup yang mewah, pengabaian akan perjuangan kepentingan umum, individualisme dan keserakahan. Dengan kata lain, semua praktek tersebut secara kuat mengarah pada praktek dan praksis dekadensi moral; (2) Moralitas tak berperan dalam politik. Politik bukannya menjadi ajang pengabdian, tetapi menjadi lahan mencari kerja. Politik sudah menjadi mesin dan industri pencarian harta dan kekuasaan. Tidak ada batas antara hal yang baik dan buruk, antara benar dan salah dalam konteks pemilihan skala nilai moral. Dekadensi moral sudah jadi fenomena politik kita, semuanya karena uang sudah menjadi raja dalam politik. Tak ada lagi nilai-nilai moral dalam diri politisi pusat-daerah; (3) Dalam konteks Indonesia, keberlakuan moral dan etika masih merupakan dikotomi antara urusan keagamaan dan urusan publik. Persoalan moral masih merupakan urusan keagamaan. Urusan moral dalam ruang publik lebih dilihat sebagai masalah individual, sehingga moralitas dan konsekwensinya tidak memiliki tempat dalam ruang publik, dan dalam konteks dunia politik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ambiguitas persoalan moral dalam penerapannya yang menjadi faktor longgarnya pengawasan publik terhadap pola, perilaku dan sikap serta tindakan moral yang salah bagi pejabat publik, para politisi dan pengambil kebijakan yang berdampak pada pelanggaran moral politik dalam praktek tatanan kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Fakta dan data pelanggaran moral pejabat publik, para politisi dan pengambil kebijakan dapat dilihat dari berbagai fakta dekadensi moral para politisi dan pejabat publik dalam ruang publik.

KESIMPULAN

Pertama, fenomena moral politik dalam kalangan generasi muda Ormas PMKRI pada 5 tahun terakhir menunjukkan: (1) fenomena moral politik

belum sepenuhnya menjadi fokus perhatian dalam pendidikan politik bagi mahasiswa PMKRI; (2) mahasiswa dalam ormas PMKRI belum merespons dan menunjukkan sikap kritis serta tindakan aksi sebagai sebuah gerakan profetis untuk menentang praktek kemerosotan moral politik bangsa; (3) bahkan mahasiswa cenderung melihat persoalan pemerosotan moral politik sebagai gejala umum yang sudah ada dan biasa (*taken for the granted*). Sehingga, fenomena moral politik itu merupakan sebuah fakta eksistensial yang menggejala dalam Kedua, model moral politik menghasilkan bahan pelatihan (*training materials*). Model yang didesain dan dikembangkan untuk program pelatihan moral politik adalah kombinasi model Dick and Carey dan model Refleksi Gibs. model refleksi Gibs secara dominan dirancang dalam strategi pelatihan. Pendekatan deduktif dalam konteks pelatihan moral politik, dimaksudkan dengan menempatkan teori, konsep, pandangan mengenai moral politik sebagai titik tolak dalam penyajian bahan pelatihan (*training materials*). Berbagai konsep, teori, pandangan-pandangan, prinsip moral politik yang telah diperkaya melalui contoh, non contoh, fakta, ilustrasi kemudian digali secara mendalam melalui cara refleksi, sebagai upaya untuk mendalami masalah baik secara kelompok dan secara pribadi. Model penelitian yang berbasiskan refleksi memberi ruang lebih banyak kepada para peserta pelatihan di luar ruangan kegiatan pelatihan untuk mengeksplorasi pengalaman, lalu mengkonfrontasinya dengan teori untuk kemudian menemukan sendiri jawaban atas persoalan yang terjadi. Model pelatihan ini mengubah paradigma *instructor centred* menjadi *trainee centred*.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg, Walter R., and Gall. Meredith Darnein *Educational Research : An Introduction*. 4th ed. New York: Longman, 1983.
- Bringle., Robert, G Julie A. Hatcher, 1999, *Reflection in Service – Learning: Making meaning of Experience*, Journal of Educational Horizon,
- Carey W. Dick, and Carey, L & Carey, J. O.. *The System Design of Instruction*, New Jersey: Pearson Education, 2009
- Creswell I, John W.. *Educational research* . Upper sadle River, NJ: Pearson, 2008.

Drew O. McDaniel & Duncan H. Brown, *Maula for Media Trainers*, Kuala Lumpur: AIBD & UNESCO, 2001.

Jurgen Habermas, *Legitimation Crisis*, Boston: Beacon Press, 1973

Kristianto, Edy, *Sakramen Politik, Mempertanggungjawabkan Memoria*, Jakarta: Lamalera, 2008.

Nedler, Leonard, *Designing Training Programs*, California: Addison-Wesley, 1982,

Robertus Robert, *Manusia Politik, Subjek radikal dan politik Emansipasi di Era kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*, Jakarta: Marjin Kiri, 2010

Suparman, Atwi, *Desain Instruksional Modern*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012),

-----, *Desain Instruksional* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011),

Thompson, Dennis F., *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000,

Sumber Internet

Leslie Lipson, Essay Contest 2005 Yanpei Chen, *MoralityAndPoliticalDiscourse.pdf* <http://www.eecs.berkeley.edu/~ychen2/professional/>, (diakses 12 September 2012)

<http://traininganddevelopment.naukrihub.com/training.html>, (diakses 15 September 2012)

Devin Finbar, *The Foundations of Political Morality*, <http://intellectual-detox.com/the-foundations-of-political-morality/> (diakses 10 September, 2012)